

STRATEGI PERTAHANAN AMERIKA SERIKAT DALAM MERESPONS ANCAMAN TIONGKOK DI INDO-PASIFIK PADA MASA KEPEMIMPINAN JOE BIDEN

United States Defense Strategy in Response to China Threats in The Indo-Pacific During Joe Biden's Leadership

Firman Fadillah*

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Jenderal Achmad Yani
narulitamd@gmail.com*

Mariane Olivia Delanova K

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Jenderal Achmad Yani
Halifa.haqqi@unsisri.ac.id
Correspondent Author: firmanf0601@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Article History

Received
23 July 2023

Revised
20 August 2023

Accepted
24 August 2023

Abstract

This study aims to explain the geopolitical dynamics that are developing in the Indo-Pacific and examine how during Joe Biden's leadership he formed his defense approach to protect interests and maintain stability in the Indo-Pacific region. By using qualitative methods and data collection techniques, namely interviews, analysis of internet sources, and related literature. Neorealism theory according to Kenneth Waltz and Arthur Lykke's strategic concept are used. The results of the research through an analysis of ends, ways, and means state that the US has the main strategy, namely by forming alliances and cooperation with regional countries and strengthening the strength of army personnel with joint exercises carried out with regional alliance countries. The existence of this strategy means that the US responds to China with caution.

Keywords:

*climate change;
environmental
migration; migration
Bangladesh to
India; human security.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika geopolitik yang berkembang di Indo-Pasifik dan mengkaji bagaimana dalam masa kepemimpinan Joe Biden membentuk pendekatannya guna melindungi kepentingan dan menjaga stabilitas kawasan Indo Pasifik. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, analisis sumber internet, serta studi pustaka terkait. Teori Neorealisme menurut Kenneth Waltz serta konsep strategi Arthur Lykke digunakan. Hasil penelitian melalui analisis tujuan, cara dan sarana menyatakan bahwa AS memiliki strategi utama yaitu dengan membentuk aliansi dan kerjasama dengan negara kawasan serta memperkuat kekuatan personel tentara dengan latihan gabungan yang dilakukan bersama negara aliansi kawasan. Adanya strategi ini berarti AS merespons Tiongkok dengan waspada.

Kata kunci:

perubahan iklim;
migrasi lingkungan;
migrasi Bangladesh ke
India; keamanan
manusia.

PENDAHULUAN

Adanya peningkatan kekuatan salah satu negara di suatu kawasan dalam sistem internasional membuat negara-negara, terutama negara hegemon, khawatir terancam dan terganggu keberadaannya. Hegemon kemudian merespons dengan mengeluarkan berbagai strategi pertahanan guna melindungi kepentingan dan menjaga stabilitas kawasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah "Indo-Pasifik" semakin sering digunakan dalam diskusi strategis di Australia, Prancis, India, Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat. Istilah tersebut mengacu pada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai satu wilayah maritim yang membentuk kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi masing-masing negara (Medcalf, 2019, p. 1). Yang dimaksud dengan kawasan Indo-Pasifik tidak memperhitungkan atau merujuk pada kawasan yang terbentuk dari integrasi kawasan, seperti Asia Tenggara, atau Asia dan Eropa (Scott, 2018).

Indo-Pasifik merupakan sebuah tatanan baru dunia dikarenakan secara geografis kawasan ini memiliki letak yang strategis. Selain itu, terdapat sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah, peningkatan ekonomi dan militer yang pesat disertai dengan kepemilikan

senjata nuklir di kawasan ini. Hal tersebut membuat kawasan Indo-Pasifik sangat berpotensi dan menjadi salah satu wilayah yang sangat penting dalam perpolitikan dunia. Oleh karena itu wilayah Indo-Pasifik sering dihadapkan pada situasi kompleks yang melibatkan banyak negara dengan berbagai kepentingan seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, India, Australia, dan Tiongkok. Kehadiran Tiongkok sebagai *New Emerging Power* membuat kawasan ini semakin dipenuhi kepentingan dan konflik.

Tiongkok merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki perkembangan cukup signifikan dalam ekonomi maupun militer. Sejak tahun 2000, Tiongkok telah menumbuhkan ekonominya menjadi negara terbesar kedua di dunia. Tiongkok juga melakukan modernisasi dan peningkatan militernya, dalam jumlah tentara, angkatan laut, hingga nuklir mereka yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2035 sebagaimana yang ditargetkan oleh Presiden sekaligus Ketua Komisi Militer Pusat Tiongkok (CMC) Xi Jinping. Dua perkembangan ini menjadi kekuatan bagi Tiongkok untuk mengembangkan pengaruhnya di dunia, namun hal ini menjadi suatu ancaman besar bagi negara-negara lainnya, khususnya

adalah kepentingan strategis AS, dan sekutunya di kawasan Indo-Pasifik.

Beberapa manuver internasional Tiongkok yang dipersepsi sebagai suatu ancaman. Pada tahun 1995, Filipina telah menuduh Tiongkok menduduki dan memiliterisasi sebuah *Mischief Reef* secara sepihak di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan di dalam wilayah laut teritori yang diklaim oleh Filipina (Joyner, 1999). Pertanda-pertanda ini mendapatkan perhatian dalam konteks strategis karena Tiongkok telah lama menerbitkan peta resmi dari klaim pribadi mereka yang menunjukkan batas yang mencakup hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan (LTS) dalam *Nine Dash Line*. Hal ini tidak sesuai dengan hukum UNCLOS yang menyatakan bahwa teritori laut ditentukan dengan jarak 12 mil dari pulau terluar suatu negara.

Tidak hanya klaim LTS, dalam upaya menjadi *the new emerging force/power*, Tiongkok juga ingin melakukan klaim atas Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, hal ini merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Tiongkok dan biasa juga disebut sebagai *One China Policy*. Salah satunya kebijakan tersebut menyatakan bahwa setiap negara yang ingin melakukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok maka negara tersebut harus memutuskan hubungan

diplomatik dengan Taiwan. Hal ini sebagai bentuk penegasan bahwa Taiwan merupakan satu kesatuan dengan Tiongkok (Islami, 2013).

Rivalitas antara Tiongkok dan AS dalam kegiatan hubungan internasional terlihat jelas ketika Amerika Serikat mengalihkan fokusnya dari Timur Tengah pada abad ke-20 ketika menganjurkan perang proksi selama Perang Dingin dan dari kampanye kontra terorisme di Irak dan Afghanistan, hingga Indo-Pasifik ketika Tiongkok muncul sebagai kekuatan ekonomi di abad 21. Sejak itu, persaingan antara kedua negara terus berkembang dalam arah yang berlawanan di bidang politik.

Selama Perang Dingin, AS menjadi negara dengan kekuatan paling dominan di kawasan Indo-Pasifik. AS menggambarkan Indo-Pasifik sebagai “panggung prioritas” kebijakan AS dikarenakan kawasan Indo-Pasifik berkemungkinan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan episentrum persaingan geopolitik global. Namun situasi berganti pasca-Perang Dingin karena perkembangan Tiongkok yang terus meningkat dan menjadi ancaman terhadap perdagangan AS serta nilai-nilai demokrasi liberal Barat. Tiongkok dilihat sebagai saingan politik, militer dan ekonomi dan Tiongkok dianggap sebagai lawan yang

seimbang bagi AS yang dapat menghalangi kepentingan dan statusquo Amerika Serikat di kawasan. Dalam menghadapi hal ini AS telah melakukan beberapa upaya perimbangan kekuatan dan pertahananya.

Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama mengeluarkan kebijakan “*Pivot to Asia*”, yang digunakan sebagai pendekatan ke Asia atau kawasan Asia-Pasifik, yang kemudian berubah penyebutannya menjadi Indo-Pasifik. Dengan mengadopsi pendekatan liberal ke Indo-Pasifik, bertujuan untuk mengintensifkan peran Amerika Serikat yang lebih besar di kawasan dan untuk mengelola kebangkitan Tiongkok dengan memperkuat struktur ketertiban kawasan yang berharap agar Tiongkok bertindak sesuai aturan.

Berbeda dena Obama, pendekatan Pemerintahan Donald Trump pada Indo-Pasifik yaitu mengenai strategi penahanan, yang lebih membatasi pengaruh Tiongkok dibanding mengintegrasikanya kedalam tatanan liberal. Trump mengedepankan Indo-Pasifik menjadi salah satu prioritas utama kebijakan luar negerinya Melalui kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang tertuang pada *National Security Strategy* (NSS) pada Desember 2017. Kebijakan ini berupaya untuk menyatukan negara-negara

yang memiliki kesepahaman pemikiran yang sama di wilayah Samudera Hindia dan kawasan Indo-Pasifik yang telah terintegrasi, untuk membentuk suatu hubungan kerja sama kolaboratif. Kepentingan bersama dalam FOIP tanpa adanya hambatan perdagangan dan investasi antara AS dengan sekutu akan mendorong pertumbuhan global.

Pergantian masa jabatan Presiden AS tidak menghentikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Donald Trump, AS tetap gencar mengirim armada kapal angkatan laut AS ke wilayah Indo-Pasifik dalam rangka menjalankan kebijakan FOIP (*Free and Open Indo-Pacific*) (CNN Indonesia, 2021). Ketika Joe Biden terpilih sebagai presiden Amerika Serikat ke empat puluh enam, dia membawa harapan untuk perubahan dalam kebijakan dalam dan luar negeri AS, termasuk kebijakan dalam wilayah Indo-Pasifik.

Di era kepemimpinan Joe Biden dari tahun 2001, strategi pertahanan AS dalam merespons ancaman yang dihadirkan oleh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik telah mengalami pergeseran dan penyesuaian yang signifikan. Ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional dari Tiongkok mendorong AS untuk mengadopsi pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi.

Salah satu pokok pikiran utama dalam strategi ini adalah penekanan pada diplomasi yang lebih aktif. AS telah berupaya membangun aliansi dan kemitraan dengan negara-negara sekutu di kawasan untuk membentuk front bersama dalam menghadapi pengaruh dan tindakan agresif Tiongkok. Diplomasi multilateral, seperti kerjasama dalam forum regional seperti ASEAN, menjadi alat penting dalam menyebarkan pengaruh kekuatan di kawasan tersebut.

Terdapat dua program baru yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Joe Biden dalam merespons adanya peningkatan kekuatan Tiongkok di Indo-Pasifik yaitu: *Pacific Deterrence Initiative* (PDI), PDI adalah program untuk memperkuat kemampuan militer AS yang kredibel untuk melindungi kepentingan AS dan sekutunya yang mencakup berbagai pengadaan senjata, kegiatan atau kerja sama dengan berbagai negara sekutu dan mitra di kawasan Indo-Pasifik (US Department of Defense, 2022).

Selain PDI, AS juga membangun *integrated deterrence* yaitu kemampuan untuk menangkal dan mengalahkan musuh dengan mengintegrasikan seluruh aspek kekuatan militer dan non-militer di semua teater atau arena dan di semua spektrum konflik yang dilakukan bersama dengan

negara sekutu dan mitra AS. Ini adalah kesiapan AS terutama untuk menghadapi Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara dan kekuatan-kekuatan lain baik dalam konflik militer tradisional, ruang angkasa, siber, dan peperangan asimetris (*asymmetric warfare*) (Garamone, 2021).

Melihat sikap yang dilakukan oleh AS untuk membendung Tiongkok, terlihat bahwa AS takut bahwa hegemoni global AS akan mulai tergerus dengan adanya Tiongkok. Adu pengaruh yang dilakukan kedua negara besar ini juga akan mulai tersisihkan karena dunia saat ini sudah bukan era bipolar lagi, melainkan multipolar yang artinya banyak kekuatan negara-negara lain yang sudah mulai aktif mencari peran global.

Fenomena rivalitas di Kawasan Indo-Pasifik antara Tiongkok dan AS ini menjadi perhatian banyak peneliti terdahulu. Seperti Vanilla Planifolia (2017) menganalisis bagaimana strategi *rebalancing* AS terhadap peningkatan kekuatan Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik. Menurutnya bagaimana AS mengubah kebijakan luar negerinya yang awalnya berfokus di kawasan Timur Tengah berpindah ke kawasan Asia-Pasifik dikarenakan adanya peningkatan kapabilitas Tiongkok di kawasan tersebut. Selanjutnya M Najeri Al Syahrin (2018) hirau mengenai Tiongkok yang muncul sebagai kompetitor

bagi AS khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Menurutnya meningkatnya kapabilitas nasional Tiongkok secara signifikan dan pesat membuat AS khawatir hegemoni yang telah berlangsung sejak beberapa dekade akan digeser dengan adanya Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik. Selanjutnya Hadis Tian, Panji Suwarno, dan Supriyadi (2021) tentang konsep geopolitik modern yaitu *Lebensraum* sebagai alat untuk menganalisis bagaimana strategi konsep Tiongkok dalam melakukan ekspansinya ke berbagai wilayah termasuk wilayah Indo-Pasifik serta bagaimana reaksi Amerika Serikat terhadap ekspansi tersebut.

Berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada strategi AS pada masa pemerintahan Joe Biden dalam merespons keberadaan Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik. AS melihat Indo-Pasifik sebagai bentuk transformasi geopolitik yang berperan penting bagi perkembangan ekonomi, politik, dan keamanan AS di kawasan. Namun, AS merasa kepentingannya tersebut terancam dengan adanya kebangkitan dari pengaruh Tiongkok secara ekonomi dan militer di wilayah Indo-Pasifik. Oleh karena itu AS berupaya untuk melakukan perimbangan kekuatan yang diperlukan.

Selain itu, fenomena yang menonjol adalah transformasi pendekatan AS yang semakin komprehensif dan terpadu. Fenomena tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis dampak dan efektivitas strategi pertahanan AS dalam merespons ancaman Tiongkok, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap dinamika keamanan regional di wilayah Indo-Pasifik.

Oleh karena itu untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman mengenai fenomena yang terdapat di kawasan Indo-Pasifik tersebut, khususnya pada masa pemerintahan Joe Biden, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yang tepat yaitu neorealisme dalam Hubungan Internasional. Neorealisme berasumsi bahwa agar sistem internasional yang anarkis stabil diperlukan perimbangan kekuatan (*balance of power*) antaraktor hubungan internasional melalui kapabilitas ekonomi, kapabilitas militer, dan pembentukan aliansi, ke dalam beberapa bentuk perimbangan dan dalam kerangka strategi pertahanan (*ends, ways, means*).

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah: bagaimana dinamika geopolitik yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik dan bagaimana dalam masa kepemimpinan Joe Biden membentuk pendekatan pertahanan

guna melindungi kepentingannya dan menjaga stabilitas kawasan tersebut.

KERANGKA ANALISIS

Neorealisme merupakan salah satu perspektif yang dijadikan acuan dalam menganalisis hubungan negara-negara dalam sistem internasional. Neorealisme sendiri muncul sebagai kritik terhadap realis yang menganggap sifat dasar manusia menjadi masalah atas adanya perebutan yang terjadi dalam hubungan internasional padahal yang menjadi masalah dalam perilaku negara bukanlah sifat dasar manusia yang konfliktual akan tetapi struktur anarki internasional itu sendiri (Dugis, 2016). Dalam hal ini neo-realis memandang bahwa sistem internasional itu anarki, tidak adanya pemerintahan dunia yang mengatur negara-negara. Dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dari tekanan sistem internasional, negara-negara akan saling mengimbangi kekuatan masing-masing (*balance of power*) baik berupa aliansi ataupun kerja sama lainnya yang sesuai dengan kepentingan nasional negaranya.

Dalam bukunya *Theory of International Politics* (1979), Waltz menyampaikan bahwa hal bisa membuat sistem anarki stabil adalah perimbangan kekuatan (*balance of power*). *Balance of*

power ini terjadi karena dua hal yakni sistem internasional yang anarki serta negara yang ada di dalam sistem anarki tersebut berusaha untuk bisa bertahan (*survive*). *Balance of power* dapat dicapai dengan dua cara yakni, pertama, *internal balancing* yang meningkatkan kapabilitas ekonomi dan kapabilitas militer. Kedua, *external balancing* yang mana dilakukan melalui pembentukan aliansi untuk bisa *survive* dalam ruang lingkup internasional.

Dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk merespons atas adanya suatu ancaman, dilakukan berbagai upaya seperti *balancing*, *hedging*, dan *bandwagoning*. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh negara untuk menghadapi ancaman.

Teori *balancing* dikemukakan oleh John J. Mearsheimer (2001). *Balancing* merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh negara untuk mencegah negara lain yang berupaya untuk mengganggu *balance of power*. *Balancing* terbagi menjadi dua tipe yaitu *external balancing* dan *internal balancing*. *External balancing* dilakukan oleh sebuah negara yang terancam dengan melakukan pembentukan aliansi dengan negara lain dalam upaya melawan ancaman tersebut. *Internal Balancing* dilakukan dengan memperkuat dan mengalokasikan

berbagai sumber daya nasional untuk membendung adanya ancaman tersebut (Little & Smith, 2005). Sementara menurut Robert A Pape (2005) *soft balancing* merupakan upaya *balancing* dengan melakukan penyesuaian politik, diplomasi, dan penguatan ekonomi.

Seorang peneliti dari *Australian National University* (ANU) bernama Evelyn Goh mengeluarkan definisi terkait *hedging*. Menurut Evelyn Goh (2006), *hedging* merupakan strategi untuk menghindari dari sebuah situasi atau sebagai cadangan saat negara tidak dapat memilih strategi *balancing*, *bandwagoning*, dan netral. Goh mengatakan bahwa *hedging* terdiri dari *soft balancing* yang berupa pendekatan politik dan ekonomi serta melibatkan kekuatan besar di suatu kawasan untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan tersebut (Wong, 2015, p. 8). Sedangkan menurut Cheng Chwee Kuik (2021), *hedging* merupakan sebuah strategi yang dilakukan negara untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus memaksimalkan keuntungan dan mencegah ancaman di kemudian hari.

Sedangkan *bandwagoning*, menurut Mearsheimer merupakan strategi yang dilakukan negara dengan bergabung bersama musuh yang lebih kuat untuk mendapatkan

keuntungan dari negara kuat tersebut (Little & Smith, 2005). Menurut Stephen M Walt (1987), *bandwagoning* dilakukan oleh negara yang lemah untuk membentuk sebuah aliansi dengan negara yang mengancam agar negara lemah tersebut tidak diserang.

Dunia internasional yang terus berkembang membuat sistem internasional yang ada berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini kemudian membuat sistem internasional mengikuti perkembangan dari kondisi hubungan internasional pada saat ini. Setiap negara melakukan hubungan kerja sama dengan didasari kepentingan nasional masing-masing negaranya dalam ruang lingkup hubungan internasional yang anarki ini. Ketika negara berada di dalam kondisi anarki, cukup sulit untuk mengetahui atau memprediksi perilaku negara lain yang dapat mengancam sehingga memaksa negara untuk bisa *survive* (Jackson & Sorensen, 2014). Sistem anarki menggambarkan kondisi yang saling bersaing dan kompetitif, setiap negara berusaha untuk memperjuangkan dan mempertahankan negaranya. Hal itu kemudian membuat negara berusaha untuk mendorong kapabilitas keamanan dan kekuatannya semaksimal mungkin karena tidak terprediksinya tindakan yang dilakukan oleh negara lain (Waltz, 1979).

Strategi pertahanan merupakan sebuah konsep rencana pertahanan militer beserta segala instrumennya yang muncul dari kebijakan pertahanan suatu negara. Kebijakan pertahanan menurut Webster yaitu merupakan program atau rencana untuk melindungi sebuah negara dari musuhnya (Tagarev, 2006). Pembuatan kebijakan pertahanan terjadi karena adanya ancaman yang muncul bagi sebuah negara lalu dibuat sebuah kebijakan pertahanan dan strategi pertahanan yang menggunakan kapabilitas negara seperti militer dan berbagai macam sumber daya lainnya. Untuk hal ini Arthur F. Lykke (1998) mengembangkan kerangka strategis tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*). Bagi Lykke, strategi adalah ekspresi koheren dari suatu proses yang mengidentifikasi tujuan, cara, dan sarana yang dirancang untuk mencapai tujuan.

Menurut Lykke, *Strategic Ends* berarti objektif seperti kepentingan atau hal apa yang ingin dicapai negara tersebut. *Goals* atau tujuan dari suatu negara dalam membuat sebuah strategi pertahanan harus jelas karena tujuan ini menentukan bagaimana strategi ini akan berjalan nantinya. *Ends* merupakan kepentingan nasional sebuah negara yang bersifat politis.

Strategic Ways berarti cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut

atau disebut *ways*. Jika sebuah strategi pertahanan sudah jelas tujuannya maka tahap kedua yaitu menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari strategi pertahanan itu sendiri.

Strategic Means berarti sumber daya atau kapabilitas sebuah negara dalam upaya yang dibutuhkan dalam mencapai hal tersebut (Yarger, 2008). Setelah kedua hal tersebut terpenuhi, terdapat sumber daya atau kapasitas yang dimiliki sebuah negara, ini bisa jadi tentara maupun keseluruhan sektor-sektor pertahanan yang dimiliki suatu negara dalam mendukung strategi pertahanan tersebut.

Dalam menganalisis strategi pertahanan Amerika Serikat di Indo-Pasifik sebagai respons peningkatan kekuatan Tiongkok yang mengancam stabilitas keamanan kawasan tersebut, dalam *strategic ends*, AS mengedepankan *free and open Indo-Pacific* (FOIP) yang berarti kawasan Indo-Pasifik yang lebih terhubung, sejahtera, aman, dan kuat, dalam *strategic ways*, memperkuat peran AS dalam membuat keamanan kolektif dengan aliansi dan kerja sama dengan institusi regional seperti ASEAN, dalam *strategic means*, AS telah melakukan revitalisasi aliansi seperti *Quad*, memperkuat kerja sama dengan ASEAN,

dibentuknya pakta pertahanan baru yaitu AUKUS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan salah satu divisi di Kementerian Pertahanan yaitu Badan Instalasi Strategi Pertahanan Indonesia (Bainstrahan) dan studi pustaka yang dilakukan dengan menggunakan data-data dari perpustakaan maupun dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pertahanan Kepemimpinan Joe Biden di Kawasan Indo-Pasifik dalam menghadapi Ancaman Tiongkok

Pada bagian ini berisi hasil penelitian mengenai strategi pertahanan kepemimpinan Joe Biden dalam melindungi kepentingannya dan menjaga stabilitas kawasan tersebut dari ancaman kekuatan Tiongkok. Selanjutnya dibahas dengan menggunakan kerangka analisis yang telah dipaparkan sebelumnya.

Strategic Ends

Strategic Ends atau tujuan strategis yang ingin dicapai sebuah negara sebagai kepentingan nasional dengan mengeluarkan strategi pertahanan. memperkuat stabilitas keamanan regional, dan hal lainnya.

Balancing

Menurut Menlu AS Anthony Blinken, Indo Pasifik adalah kawasan dengan setengah dari mitra dagang utama AS berada di Indo-Pasifik. Kawasan ini adalah tujuan bagi hampir sepertiga ekspor AS, sumber investasi luar negeri langsung senilai 900 miliar dolar di AS yang mampu menciptakan jutaan lapangan kerja yang tersebar di seluruh 50 negara bagian. Selain itu, saat ini, negara-negara di Indo-Pasifik membantu mendefinisikan sifat dasar tatanan internasional, dan sekutu serta mitra AS di seluruh dunia memiliki andil dalam hasilnya. Dalam dokumen Indo-Pasifik AS, AS mendukung upaya dalam: berinvestasi dalam institusi demokrasi, pers yang bebas, dan masyarakat sipil yang dinamis; meningkatkan transparansi fiskal untuk mengungkap korupsi dan mendorong reformasi; memastikan laut dan langit kawasan ini diatur dan digunakan sesuai dengan hukum internasional; dan memajukan

pendekatan umum terhadap teknologi yang sedang berkembang dan kritis, internet, dan ruang siber.

Amerika Serikat sebagai negara aktor dalam penelitian ini mengeluarkan beberapa kebijakan pertahanan secara langsung maupun tidak langsung di kawasan Indo-Pasifik. Disebutkan bahwa dalam berbagai kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh AS secara implisit menyiratkan bahwa AS tidak ingin hegemonitas kawasan tergeser dengan meningkatnya kekuatan Tiongkok, meskipun AS sendiri tidak menyebutkan secara gamblang bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai respons atas peningkatan kekuatan Tiongkok. Namun, tetap pada tujuan utama AS yang disebutkan pada *National Defense Strategy* menyebutkan bahwa meningkatnya aktivitas Tiongkok di kawasan Indo Pasifik merupakan ancaman bagi AS. Oleh karena itu, tujuan AS sebenarnya yaitu untuk mempertahankan hegemonitas di kawasan Indo Pasifik agar tidak bergeser kepada Tiongkok.

Dari ketiga strategi dalam merespons atas ancaman yang ditimbulkan oleh negara lain, menurut peneliti, AS menggunakan strategi *balancing* dalam upaya untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Hal ini ditandai dengan adanya pendekatan terhadap negara-negara aliansi AS di kawasan Indo-Pasifik, dan untuk lebih jelasnya akan dipaparkan di tahap *strategic ways* tentang bagaimana cara AS untuk melakukan *balancing* terhadap ancaman yang ditimbulkan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Free and Open Indo Pacific

Free and Open Indo Pacific (FOIP) atau Indo Pasifik yang terbuka merupakan sebuah gagasan strategi yang dibangun oleh AS dan sekutunya yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Gagasan ini berarti sebagai sebuah komitmen bagi Amerika Serikat dalam menciptakan kawasan Indo Pasifik yang terbuka, terhubung, sejahtera, makmur, dan kuat.

Gambar 1. Peta Indo-Pasifik



Sumber: *International Institute for Strategic Studies*

Pemerintah AS selalu mengedepankan terkait FOIP ini, kepentingan nasional AS sendiri dalam strategi ini yaitu untuk mendorong terciptanya kawasan yang bebas dan terbuka, sehingga negara-negara berhak untuk membuat kebijakan luar negerinya masing-masing serta konsisten dalam menjalankan kehidupan bernegara sesuai dengan hukum internasional, seperti daratan, laut, dan udara yang telah diatur dalam berbagai rezim internasional (White House Washington, 2022). Hal tersebut tertuang dalam *Indo-Pacific Strategy* yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada 22 Februari tahun 2022.

Hal diatas merupakan pemaparan terkait bagaimana strategi FOIP ditujukan, namun hal tersirat yang cukup implisit dimasukkan ke dalam strategi ini oleh pemerintah AS. Kepentingan nasional AS sebenarnya dalam upayanya mengedepankan FOIP yaitu untuk membendung adanya aktivitas abnormal yang dilakukan oleh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Aktivitas tersebut di antaranya, seperti klaim LTS dan upaya reunifikasi Tiongkok-Taiwan.

Keduanya merupakan hal yang penting bagi AS. Jika klaim LTS terus dilakukan serta berhasilnya Taiwan jatuh ke tangan Tiongkok, hal ini merupakan pukulan telak bagi AS. Tiongkok sendiri saat ini.

Penetapan klaim LTS oleh Tiongkok merupakan sebuah kerugian bagi AS, karena LTS merupakan jalur perdagangan bebas yang salah satu tujuannya yaitu menuju Amerika Serikat, LTS Setiap tahunnya, perdagangan bebas yang melewati kawasan tersebut mencapai angka 5,3 triliun dolar AS. Angka tersebut didapatkan oleh AS sebesar 1,2 triliun dolar AS (Cordesman & Burke, 2019). Oleh karena itu, AS bersikeras menolak klaim tersebut karena tidak sesuai dengan *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS).

Jatuhnya Taiwan ke tangan Tiongkok berarti kegagalan AS dalam melaksanakan *containment policy*, *Containment Policy*, yang berarti suatu politik bertujuan mencegah berkembangnya pengaruh suatu negara atau suatu sistem politik dari pihak lawan agar pengaruh komunisme tidak meluas. Dalam konteks hubungan Tiongkok-Taiwan, AS disini melihat Tiongkok sebagai Major Threat bagi keamanan di Indo-Pasifik. Adanya Taiwan *Relations Act* (TRA), AS berjanji untuk melindungi Taiwan dari berbagai bentuk ancaman ataupun embargo.

Dikeluarkannya strategi Indo-Pasifik ini bertujuan agar kedua hal tersebut tidak terjadi, AS berupaya untuk menjalin koneksi dengan berbagai negara di kawasan untuk bersama-sama menolak adanya klaim LTS dan reunifikasi Tiongkok-Taiwan, karena selain merugikan AS, hal tersebut juga merugikan bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

Strategic Ways

Strategic ways merupakan cara-cara bagaimana agar *strategic ends* dapat tercapai. Berikut merupakan *strategic ways* yang dilakukan AS dalam rangka mencapai *goals* kepentingan nasional AS.

Presiden Joe Biden telah berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi para pemimpin yang diadakan oleh lembaga-lembaga regional utama: APEC; KTT AS-ASEAN dan Asia Timur; dan *Quad*, yang terdiri dari India, Jepang, dan Australia. Dalam konteks, politik luar negeri, AS telah beberapa kali menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri Kemitraan Mekong-AS. Juga terdapat pembentukan pakta pertahanan baru yang bernama AUKUS dan *Partners in the Blue Pacific* (PBP).

Sebagai upaya *balancing*, seperti yang telah dijelaskan pada teori *balancing* menurut John Mearsheimer. Dalam melakukan

external balancing untuk membendung ancaman dari negara lain, negara membentuk aliansi dengan negara-negara lainnya sebagai respons atas adanya ancaman tersebut (Little & Smith, 2005). Serta terdapat juga upaya *soft balancing* dengan melakukan diplomasi dan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain. Berikut upaya *external balancing* melalui revitalisasi aliansi di kawasan Indo-Pasifik.

Quadrilateral Alliance

Aliansi *Quad* terdiri dari empat negara: Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang. Awal mula pembuatan quad ini dilatarbelakangi oleh gempa bumi dan tsunami tahun 2004 yang melanda Samudera Hindia. Karena banyak bencana alam yang mematikan, Amerika Serikat telah meluncurkan operasi penyelamatan terpadu. Angkatan bersenjata dari negara lain juga mendukung dan berpartisipasi dalam operasi AS. Negara-negara yang berpartisipasi saat itu antara lain Australia, Jepang dan India.

Keempat negara di atas mendapat sebuah gelar "*Tsunami Core Group*" karena dianggap sebagai pihak yang paling aktif dalam mendukung negara-negara yang terkena dampak gempa dan tsunami 2004. Keempat negara berperan aktif dengan

mengirimkan 40.000 tentara dan sukarelawan untuk mengerahkan berbagai pesawat dan helikopter untuk evakuasi dan distribusi logistik (Grossman, 2005). Koordinasi yang baik dalam bantuan tersebut, khususnya keempat negara telah menghasilkan kerjasama lebih lanjut di bidang keamanan laut.

Adanya *Tsunami Core Group* membuat hubungan keempat negara tersebut semakin dekat dan memberikan referensi untuk membuat sebuah kerangka kerja sama yang lebih intens. Lalu terbentuklah *Quadrilateral Security Dialogue* (QSD) yang beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia pada tahun 2007, terbentuknya QSD ini bertujuan untuk menghubungkan negara-negara demokratis di kawasan Indo-Pasifik dalam rangka menghadapi berbagai isu-isu keamanan di kawasan yang menjadi kepentingan bersama khususnya negara anggota QSD yaitu AS, Jepang, India, dan Australia. Shinzo Abe yang merupakan Perdana Menteri Jepang pada saat itu memiliki ide untuk memperluas kerjasama dengan negara-negara Asia yang lebih luas, hal ini dilakukan dengan adanya pengembangan jaringan laut luas yang berada di kawasan Pasifik yang secara langsung menghubungkan Amerika Serikat, Jepang,

India, dan Australia. Shinzo Abe mengharapkan terbentuknya kerjasama ini dapat lebih mempromosikan strategis dan kepentingan bersama di kawasan Indo Pasifik (Freeman & Oba, 2019).

Hubungan keempat negara tersebut semakin bertambahnya tahun, semakin kuat. Hal ini terlihat dari berbagai operasi khusus yang digelar oleh AS di berbagai kawasan, seperti Operasi Pembebasan Irak yang di dalamnya terdapat koalisi AS bersama Jepang dan Australia, kedua negara tersebut ingin lebih intens dalam melakukan kerjasama dalam bidang keamanan. Masuknya India ke dalam aliansi tersebut membuat kerangka kerjasama keempat negara semakin kuat. Pada tahun 2007, QSD menggelar latihan gabungan militer di Teluk Benggala sebagai sebuah bentuk adanya peningkatan kerjasama keamanan.

Namun adanya QSD ini menimbulkan protes dan kritik dari berbagai pihak, lalu pada akhirnya Shinzo Abe mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Jepang. Dengan mundurnya Shinzo Abe, hal ini membuat aliansi QSD padam. Adanya kemunduran dari QSD ini membuat Australia lebih memilih meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok, karena Australia khawatir dengan kedekatannya terhadap QSD

membuat hubungan bilateral antara Australia dengan Tiongkok terganggu.

Setelah terpilihnya kembali Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang pada tahun 2012, Jepang berusaha untuk membangkitkan QSD kembali dengan melalui pendekatan terhadap negara-negara anggota QSD. Adanya pendekatan ini membuat QSD kembali bangkit ditandai dengan terjalinnya kembali hubungan erat antara negara-negara anggota. Lalu pada tahun 2017, dalam KTT ASEAN keempat negara tersebut mengadakan pertemuan di sela-sela KTT ASEAN, mereka membicarakan tentang rencana untuk meningkatkan hubungan timbal balik pertahanan dan keamanan antara negara aliansi.

QSD ini kemudian berubah menjadi '*Quad*' pada tahun 2017 merupakan upaya menjaga keamanan kawasan di Indo-Pasifik (Envall, 2019). Melihat adanya kebangkitan Tiongkok yang dikhawatirkan mengancam keamanan kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat bersikeras untuk membendung hegemoni Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik. Pada 18 Februari 2021, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan memperkuat dan memperpanjang aliansi '*Quad*' dalam upaya menerapkan kawasan

Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan inklusif.

Pada *Joint Statement* yang diadakan Maret 2021, “*The Spirit of the Quad*”, negara-negara anggota *Quad* memaparkan terkait *Free and Open Indo Pacific* dan ketertiban maritim berbasis aturan hukum Internasional di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dikarenakan klaim maritim Tiongkok yang perlu dilawan dan dibantah oleh negara anggota *Quad*. Dalam pertemuan tersebut juga, *Quad* mengadakan pertemuan yang bernama *Quad Plus* dalam merespons adanya wabah Covid-19. *Quad plus* ini diikuti oleh negara anggota *Quad* serta tambahan nya yaitu Korea Selatan, New Zealand, dan Vietnam (Rajagopalan, 2020).

Saat ini dorongan untuk mengembangkan *Quad* menjadi *Quad Plus* makin kuat. U.S. *National Security Advisor* Jake Sullivan dan Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Indo-Pasifik Kurt Campbell sangat setuju untuk mengembangkan *Quad* menjadi *Quad Plus*. Beberapa negara di kawasan yang sekarang potensial untuk menjadi anggota baru *Quad* adalah Korea Selatan, Selandia Baru, dan Vietnam.

Korea Selatan sampai saat ini tampak ragu-ragu karena berusaha untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Tiongkok. Di mata AS ini dianggap sebagai ketidaktegasan Korea Selatan. Jadi, AS akan mendesak Korea Selatan untuk menjadi anggota *Quad*. Pada dasarnya Korea Selatan sudah berpartisipasi secara informal dalam *Quad*. Yang menjadi hirauan bagi Korea Selatan adalah jika *Quad* menjadi lebih formal misalnya menjadi aliansi yang terlembaga dan ditujukan anti-Tiongkok. Korea Selatan tampak sangat hati-hati tentang ini agar tidak memperburuk hubungan dengan Tiongkok. Tekanan dan masalah yang sama juga dihadapi oleh Selandia Baru yang kini harus membuat keseimbangan antara hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan hubungan dengan AS dan Australia dalam bidang keamanan dan politik dengan prinsip *rules-based international order* dan demokrasi yang mereka suarakan. Jadi, ini juga masalah kredibilitas bagi Selandia Baru di mata para sekutu tradisional mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam sangat asertif menyuarakan dan bersikap terhadap Tiongkok, terutama dalam masalah LTS. Perlu dilihat lebih teliti kunjungan Wakil Presiden AS ke Singapura

dan Vietnam 22-24 Agustus 2021 yang lalu. AS menegaskan sikap yang makin keras dan dukungan kepada Vietnam dan negara-negara lain dalam masalah LTS. Juga sangat mungkin Kamala Harris membujuk Vietnam tergabung ke dalam *Quad Plus*. Jika Vietnam masuk ke dalam *Quad Plus*, AS mencatat kemenangan besar dalam diplomasinya sebab berhasil menarik negara ASEAN ke dalam payung *Quad*. Tetapi langkah Vietnam ini bisa mengganggu komitmen negara-negara ASEAN terhadap AOIP.

Sementara itu Prancis, Jerman, dan Inggris tampaknya juga akan lebih memperhatikan Indo-Pacific. Tetapi masih menjadi pertanyaan tentang motif mereka bergabung dalam *Quad Plus*. Tentu AS sangat menginginkan Prancis, Jerman, dan Inggris dalam *Quad Plus* akan memperbesar kekuatan politik dan militer *Quad*. Tetapi *Quad* pada dasarnya ditujukan untuk membendung (*contain*) Tiongkok. Sementara itu ketiga negara Eropa ini tidak mempunyai masalah keamanan kawasan secara langsung dan vital dengan Tiongkok. Mereka juga mempunyai kepentingan ekonomi yang besar dalam hubungannya dengan Tiongkok. Jadi, mungkin saja ketiga negara Eropa ini sekarang mulai bergerak menuju Indo-Pasifik yang makin penting bagi ekonomi mereka dan juga untuk

memperkuat kehadiran dan pengaruh mereka di kawasan Indo-Pasifik, tetapi belum tentu akan bergabung dalam *Quad* dengan tujuan untuk membendung Tiongkok. Bergabung ke dalam *Quad Plus* untuk membendung Tiongkok juga bukan pilihan yang baik bagi mereka, sebab mereka bisa dituduh menciptakan suatu perang dingin baru di kawasan Indo-Pasifik dengan mentalitas kolonialisme mereka yang masih ada di benak mereka. Negara-negara di kawasan ini tidak menginginkan kekuatan dari luar kawasan, terutama yang tergabung dalam NATO, memecah dan memperburuk situasi keamanan Indo-Pasifik. Kishore Mahbubani seorang pemikir strategis dari Singapura menulis dalam the Straits Times bahwa “*Asia, say no to NATO*” (Hasil Wawancara, 2022).

Quad Plus juga akan menjadi tantangan bagi ASEAN AOIP dan ASEAN *centrality*. ASEAN bisa dianggap kurang relevan. Ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa AS tidak percaya terhadap peran dan kontribusi ASEAN. Jadi, ASEAN, terlebih Indonesia, tidak akan senang jika *Quad Plus* berkembang dengan memasukkan tiga negara anggota NATO yang potensial menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai arena kompetisi militer seperti perang dingin baru. Rusia tentu tidak akan tinggal diam jika Indo-

Pasifik menjadi arena persaingan militer yang melibatkan negara-negara Eropa anggota NATO. Situasi ini akan lebih mengkhawatirkan jika berakhirnya INF di Eropa memindahkan arena persaingan rudal nuklir jarak menengah dari Eropa ke Asia Pasifik.

Selain masalah perluasan negara yang berpartisipasi menjadi *Quad Plus*, *Quad* juga memperluas area kerjasama di luar bidang militer. Sudah dikembangkan kerjasama penanganan Covid-19, penanganan bencana, kontra-terorisme, perubahan iklim, inisiatif untuk kerjasama maritime, dan siber. Untuk kerjasama ekonomi, *platform* yang akan digunakan oleh AS adalah *Indo-Pacific Economic Framework*. IPEF bisa menjadi tantangan bagi RCEP di mana banyak sekutu AS bergabung di dalamnya bersama-sama dengan negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Jadi, AS tampaknya berusaha untuk menyanggah *Quad* dengan *Indo-Pacific strategy* yang lebih luas. *Quad* fokus pada keamanan dan militer, sedangkan IPEF bergerak di bidang ekonomi, dan mekanisme lain di bawah naungan *Indo-Pacific strategy*. Perlu untuk mengantisipasi *Quad*, *Quad Plus*, dan *Free and Open IndoPacific* (FOIP) akan menjadi lebih kuat sebagai strategi AS di kawasan Indo-Pacific.

AUKUS *Alliance*

Pada tanggal 15 September Australia, Inggris, dan AS mengumumkan pembentukan AUKUS (Australia, the United Kingdom, the US) untuk menangkai Tiongkok. Area kerjasama AUKUS mencakup pertukaran informasi intelijen, teknologi quantum, teknologi pertahanan bawah laut, akuisisi rudal/misil jelajah (*cruise missile*), *artificial intelligence*, dan *interoperability* militer. Langkah pertama kerjasama AUKUS adalah pengadaan kapal selam nuklir untuk Australia. Untuk pertama kali AS mengeksport teknologi kapal selam nuklir ke negara non-nuklir sejak tahun 1958 saat AS memberikan teknologi kapal selam nuklir ke Inggris (Hasil Wawancara, 2022).

AUKUS menegaskan prioritas militer kebijakan Indo-Pasifik AS. Sebelumnya AS telah meluncurkan *Rebalancing Asia Pacific* atau *Asia Pivot* era Presiden Obama, mengubah *Pacific Command* menjadi *Indo-Pacific Command*, penguatan QUAD (AS, Australia, India, dan Jepang), melakukan *freedom of navigation operations* (FONOPs) di Laut Tiongkok Selatan, *Malabar Naval Exercise*, kunjungan Menteri Pertahanan dan Wakil Presiden AS ke Singapura, Filipina, dan Vietnam. AS juga pernah meminta ijin *refueling* pesawat P-8 Poseidon di Indonesia,

namun Indonesia menolak permintaan AS atas dasar politik luar negeri bebas dan aktif (Hasil Wawancara, 2022).

Sementara itu bergabungnya Inggris ke AUKUS membuka pintu untuk aktif di kawasan Indo-Pasifik yang sebenarnya sudah terdeteksi sejak kapal perang mereka mulai hadir di Laut Tiongkok Selatan. Jika Inggris juga akan bergabung *Quad Plus*, agenda “*Global Britain*” pasca-Brexit bertemu dengan strategi Indo-Pasifik AS.

Partners in the Blue Pacific (PBP)

Meningkatnya eskalasi ketegangan di kawasan Pasifik membuat Amerika Serikat meluncurkan sebuah aliansi baru 401egiona *Partners in the Blue Pacific (PBP)*. Dalam rangka melanjutkan dalam dukungannya terhadap kesejahteraan, kemakmuran, dan keamanan di Pasifik, AS bersama Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Inggris pada tanggal 24 Juni 2022 sepakat untuk membentuk sebuah kerangka 401egionali yang inklusif dan informal dalam rangka mendukung prioritas di Pasifik secara efektif dan efisien (White House Government, 2022).

PBP dibentuk karena mereka merasa bahwa mereka harus 401egiona dalam kawasan tersebut, sesuai dengan prinsip 401egionalism Pasifik, kedaulatan,

transparansi, akuntabilitas, serta semua hal itu dipimpin dan dilaksanakan oleh negara-negara Kepulauan Pasifik.

Strategic Means

Strategic Means, merupakan formula terakhir dalam merumuskan sebuah strategi pertahanan dalam rangka menyokong *strategic ways* dan *strategic ends*. *Strategic Means* menurut Arthur Lykke merupakan sumber daya atau kapabilitas untuk pelaksanaan strategi tersebut.

Sarana (sumber daya) menjelaskan sumber daya spesifik apa yang akan digunakan dalam menerapkan konsep untuk mencapai tujuan. Sarana dapat berwujud atau tidak berwujud. Contoh sarana berwujud termasuk kekuatan, orang, peralatan, uang, dan fasilitas. Sumber daya tak berwujud mencakup hal-hal seperti “kehendak,” keberanian, atau kecerdasan.

Oleh karena itu, dalam mencapai *strategic ends* dan menyokong *strategic ways* AS di kawasan Indo-Pasifik, AS memerlukan adanya sarana atau sumber daya untuk mewujudkan hal tersebut. Sarana atau sumber daya tersebut atau *strategic means* akan dijabarkan sebagai berikut:

Hegemonitas AS di Indo Pasifik

Hegemonitas AS di kawasan Indo Pasifik memang mengalami posisi turun naik dan dapat dikatakan adanya ketidakstabilan. Hal ini yang menjadikan AS berupaya sangat keras untuk menghambat pergerakan Tiongkok dan mengimbangi dengan berbagai strategi. Dalam rentang tiga dekade belakangan, Tiongkok telah berkembang dari negara terbelakang menuju posisi terdepan dalam urusan-urusan dunia. Tampak jelas negara ini berada di lintasan untuk meraih posisinya yang bersejarah sebagai ekonomi terbesar, menyingkirkan AS. Tiongkok terus mengancam hegemoni AS di dunia secara umum dan di kawasan Asia Timur atau Asia Pasifik khususnya (Hasil Wawancara, 2022).

Tabel 1. Perbandingan Anggaran Pertahanan AS-Tiongkok dalam US Dollar

Tahun	Amerika Serikat	Tiongkok
2018	639 bn US\$	167 bn US\$
2019	686 bn US\$	172 bn US\$
2020	738 bn US\$	183 bn US\$
2021	754 bn US\$	209 bn US\$
2022	770 bn US\$	230 bn US\$

Sumber: CSIS, *World Bank*, dan *Global Fire Power*

Dari Tabel 1 di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan anggaran pertahanan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, meskipun anggaran Tiongkok tidak sebesar

AS, hal ini tetap menjadi ancaman bagi AS karena peningkatan anggaran Tiongkok terbilang cukup signifikan dan dicurigai sedang merancang alat-alat pertahanan militer yang canggih dan mampu menyaingi AS. Hal ini yang membuat AS mengeluarkan berbagai kebijakan dalam upaya *rebalancing* di kawasan Indo-Pasifik.

Hadirnya Tiongkok memberikan alternatif dalam interaksi keamanan regional. Akibatnya pergeseran ini memicu perdebatan kontemporer bagaimana mengelola konflik dan hegemoni antar dua kekuatan tersebut.

Dalam dokumen *National Security Strategy* (NSS) AS, menyebutkan negara-negara yang menjadi ancaman bagi AS, yaitu Rusia, RRT (Tiongkok), Iran dan Korea Utara, terlebih terkait dengan senjata nuklir. Selain itu, beberapa kebijakan AS yang mendukung kepemimpinan globalnya di dunia untuk mengupayanya Tiongkok sebagai pesaingnya, diantaranya adalah: (1) AS bersama mitra NATO terus memberikan dukungan persenjataan dan intelijen kepada ukraina, dan menekan rusia melalui sejumlah sanksi. (2) kebijakan AS di kawasan Indo-Pasifik terkait dengan strategi perimbangan kembali (*rebalance strategy*) merupakan upaya untuk mengimbangi keberhasilan strategi belt and road inisiatif (BRI) RRT

yang diterapkan AS melalui pendekatan diplomasi, ekonomi dan militer. (3) selain itu ketegangan as-iran di timur tengah telah menjadi sumber konflik di berbagai wilayah regional termasuk di yaman, suriah dan teluk persia, yang kemudian memicu terjadinya perang *proxy* dan aksi kekerasan bersenjata.

Pada konteks militer, agresivitas Tiongkok di kawasan semakin juga mendorong AS turut serta melakukan eksistensi yang melibatkan militer, salah satunya patroli rutin militer yang melibatkan armada laut dan armada udaranya di wilayah-wilayah internasional, seperti di LTS, LCT, Laut Jepang, dan lainnya. Selain itu, dalam beberapa kesempatan Presiden Joe Biden mengungkapkan komitmen AS terhadap isu-isu regional, seperti dukungan terhadap Taiwan jika Tiongkok menginvasi wilayahnya, dan dukungan terhadap *claimant states* di LTS sehingga AS menyatakan penekanan terhadap Tiongkok untuk mengedepankan diplomasi mencapai COC.

Pada bidang ekonomi pun, AS berupaya mengimbangi BRI-nya Tiongkok dengan TPP yang dahulu sempat terhenti jaman Trump termasuk menghindari perang dagang. Dalam konteks politik, keikutsertaan AS dalam berbagai *engagement* secara bilateral, trilateral, maupun multilateral

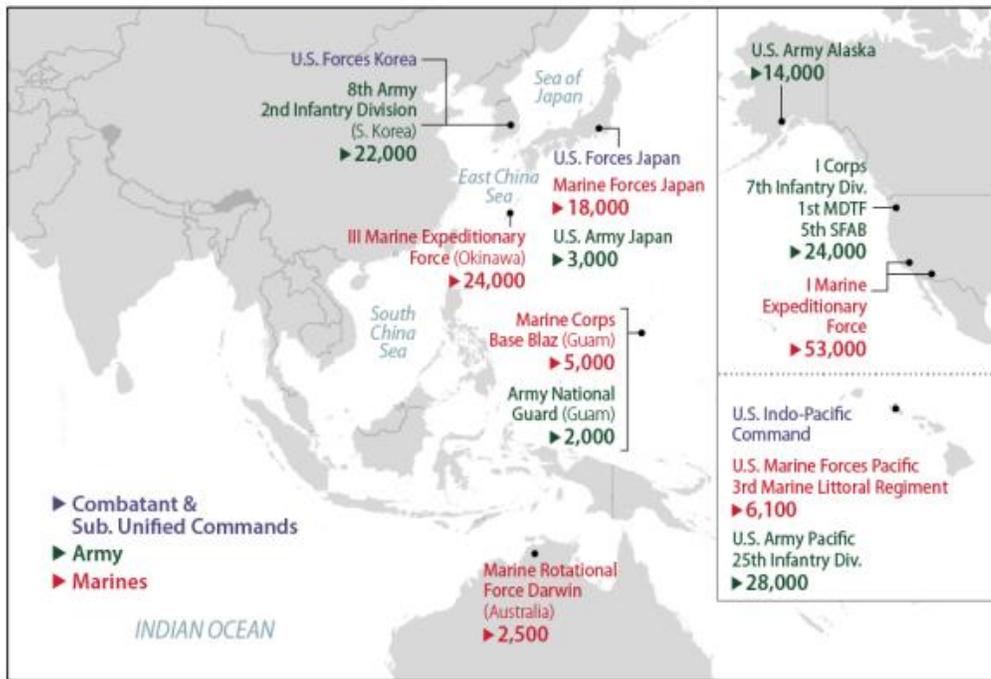
dalam forum-forum internasional menjadi sebuah pendekatan yang efektif sehingga dapat mendekatkan diri menggunakan kepentingan bersama dan penerapan nilai-nilai yang dibangun oleh AS.

Kekuasaan AS dikawasan Indo Pasifik memang mengalami posisi turun naik dan dapat dikatakan adanya ketidakstabilan. Hal ini yang menjadikan AS berupaya sangat keras untuk menghambat pergerakan Tiongkok dan mengimbangi dengan berbagai strategi. Dalam rentang tiga dekade belakangan, Tiongkok telah berkembang dari negara terbelakang menuju posisi terdepan dalam urusan-urusan dunia. Tampak jelas negara ini berada di lintasan untuk meraih posisinya yang bersejarah sebagai ekonomi terbesar, menyingkirkan AS. Tiongkok terus mengancam hegemoni AS di dunia secara umum dan di kawasan Asia Timur atau Asia Pasifik khususnya.

Kapasitas dan Kapabilitas AS di Kawasan

AS cenderung telah melakukan berbagai pembangunan pangkalan militer di beberapa negara aliansi nya di berbagai kawasan, seperti di kawasan Indo-Pasifik. Untuk menghalau adanya presensi Tiongkok di kawasan tersebut, AS telah membangun berbagai pangkalan militer sebagai berikut:

Gambar 2. Major U.S. Headquarters and Army and Marine Units in Around the Indo-Pacific Region



Sumber: *United States Army Pacific (USARPAC)*

Tersebaranya pangkalan militer AS di kawasan Indo-Pasifik, lihat Gambar 2, merupakan sarana bagi AS dalam menjalankan strateginya di Indo-Pasifik dalam membendung aktivitas Tiongkok di kawasan. Banyaknya pangkalan militer ini memudahkan AS dalam upaya asistensi jika terjadi pelanggaran terhadap negara aliansi yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Adanya pangkalan militer ini juga memudahkan AS dalam melakukan patroli di kawasan yang rawan terjadinya pelanggaran kedaulatan, AS seringkali melakukan patroli dengan menggunakan kapal maupun pesawat

tempur seperti yang sering dilakukan di Selat Taiwan.

Pacific Deterrence Initiative

Dalam rangka meningkatkan postur kekuatan militer AS di kawasan Indo-Pasifik, pemerintah AS mengeluarkan dua kebijakan baru yaitu *Pacific Deterrence Initiative* dan *Integrated Deterrence*, dua program ini merupakan gagasan pemerintah AS untuk lebih memperkuat postur militer AS serta kehadiran AS di kawasan Indo-Pasifik.

PDI adalah program untuk memperkuat kemampuan militer AS yang kredibel untuk

melindungi kepentingan AS dan sekutunya yang mencakup berbagai pengadaan senjata, kegiatan atau kerjasama dengan berbagai negara sekutu dan mitra di kawasan Indo-Pasifik. PDI menekankan pada pengadaan senjata tepat sasaran jarak jauh untuk mendukung manuver laut dan udara di kawasan Indo-Pasifik. Beberapa program PDI mencakup tiga area yaitu: 1) Pembangunan *force structure* dan *posture* yang mampu melakukan peperangan dan *deterrence*; 2) Latihan, eksperimen, dan inovasi; dan 3) Memperkuat aliansi dan kemitraan (*strengthening alliances and partnership*).

PDI ini menegaskan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater strategis AS seperti halnya Eropa dengan menekankan pada kemampuan untuk bersaing dan memenangkan peperangan. Program ini menunjukkan pandangan AS tentang *peace through strength* yang bertumpu pada strategi penangkalan dan kemampuan ofensif/*strike* (pukul) untuk menghadapi Tiongkok dan meyakinkan kepada negara-negara sekutu dan mitra tentang komitmen AS di kawasan Indo-Pasifik. Total anggaran untuk program PDI ini adalah 7.1 miliar dolar AS untuk tahun 2022. Ini adalah bagian dari program 6 tahun PDI (2022-2027) sebesar 27 miliar dolar AS (Department of Defense, 2022).

Integrated Deterrence

Selain PDI, AS juga membangun *integrated deterrence* yaitu kemampuan untuk menangkal dan mengalahkan musuh dengan mengintegrasikan seluruh aspek kekuatan militer dan non-militer di semua teater atau arena dan di semua spektrum konflik yang dilakukan bersama dengan negara sekutu dan mitra AS. Ini adalah kesiapan AS terutama untuk menghadapi Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara dan kekuatan-kekuatan lain baik dalam konflik militer tradisional, *space*, siber, dan peperangan asimetrik (*asymmetric warfare*) (Hasil Wawancara, 2022).

Tampaknya dengan konsep atau inisiatif baru ini, AS berusaha untuk juga mengintegrasikan aliansi-aliansi bilateral yang sudah ada dengan QUAD, AUKUS, dan *Five Eyes*. Kawasan ini akan menjadi area persaingan geopolitik dan persaingan militer yang akan menarik masuk kekuatan-kekuatan lain terutama UK dan Prancis ke kawasan Indo-Pacific. Kawasan ini tampaknya akan menyaksikan munculnya "*Indo-Pacific NATO*" yang digalang oleh AS dengan program *Pacific Deterrence Initiative* dan *Integrated Deterrence*. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa AS sangat aktif berusaha mengembangkan kerjasama

pertahanan dengan negara-negara di kawasan baik secara bilateral dan multilateral yang mencakup kerjasama infrastruktur pertahanan, akses logistik, dan pangkalan untuk *strike* dan *surveillance-reconnaissance*.

Kesiapan Militer AS di Kawasan Exercise RIMPAC

RIMPAC atau *Rim of the Pacific Exercise* merupakan sebuah latihan maritim terbesar di dunia. RIMPAC biasanya diadakan dua tahun sekali di Hawaii. RIMPAC diadakan oleh AS melalui *Indo-Pacific Command* (USINDOPACOM). Dengan RIMPAC, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat berupaya meningkatkan interoperabilitas di antara angkatan bersenjata Lingkar Pasifik, sebagai sarana untuk mempromosikan stabilitas di kawasan demi keuntungan semua negara yang berpartisipasi. Hal ini dijelaskan oleh Angkatan Laut AS sebagai kesempatan pelatihan unik yang membantu peserta membina dan mempertahankan hubungan kerja sama yang sangat penting untuk memastikan keselamatan jalur laut dan keamanan di lautan dunia.

RIMPAC 2022 diadakan pada tanggal 29 Juni hingga 4 Agustus. Sebanyak 26

negara telah memulai latihan maritim multinasional dua tahunan RIMPAC 2022 edisi ke-28. Pada 1 Juni 2022, total 26 negara telah dikonfirmasi untuk mengikuti Latihan RIMPAC 2022, dengan daftar sebagai berikut: Australia, Brunei, Kanada, Chili, Kolombia, Denmark, Ekuador, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Israel, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Peru, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Tonga, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Selama latihan, sekitar 25.000 personel dari negara-negara peserta akan beroperasi bersama dan menggunakan berbagai kemampuan untuk mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Iterasi terbaru melibatkan serangkaian latihan termasuk anti-kapal selam, rudal, meriam, pertahanan udara, kontra-pembajakan, pembersihan ranjau, amfibi, menyelam, operasi penyelamatan dan operasi pembuangan persenjataan peledak .

Exercise Malabar

Exercise Malabar atau Latihan Malabar merupakan sebuah latihan gabungan militer angkatan laut yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Jepang, dan India sebagai mitra tetap dalam latihan gabungan tersebut. Latihan tahunan Malabar mencakup beragam

kegiatan, mulai dari operasi tempur tempur dari kapal induk melalui operasi larangan maritim, perang anti-kapal selam, operasi penyelamatan menyelam, operasi amfibi, operasi kontra-pembajakan, pendaratan helikopter lintas dek, dan operasi perang anti-udara.

Pada tahun 2021, Latihan Malabar diadakan oleh Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Fase pertama Malabar, yang dimulai pada bulan Agustus, termasuk operasi maritim, operasi perang anti-kapal selam, operasi perang udara, acara meriam tembakan langsung, pengisian ulang di laut, operasi penerbangan lintas geladak, dan operasi larangan maritim di Filipina. Laut. Fase kedua akan terdiri dari latihan target latihan perang anti-kapal selam bergerak permukaan dan udara (EMATTEX), operasi helikopter lintas dek, latihan meriam permukaan, dan pengisian ulang di laut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan operasi maritim terintegrasi antara negara-negara *Quad* di Wilayah Samudra Hindia .

Garuda Shield dan Super Garuda Shield

Garuda Shield adalah latihan bersama selama dua minggu antara Angkatan Darat Amerika Serikat dan Angkatan Darat Indonesia. Tujuan dari latihan bersama ini adalah untuk meningkatkan dan memperkaya kemampuan perang hutan baik Angkatan

Darat AS maupun Angkatan Darat Indonesia. *Garuda Shield* tahun ini dirancang guna meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Indonesia dengan Divisi Infanteri ke-25 AS. Program ini juga dapat memperkuat hubungan, serta mempromosikan keamanan regional.

Indonesia dan AS akan kembali menggelar latihan militer gabungan terbesar *Garuda Shield 2022* pada Agustus mendatang. *Garuda Shield* akan dilakukan dari tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022 di Baturaja, Amborawang, dan Pulau Batam. Selain Indonesia dan AS, juga terdapat personel militer dari Australia, Jepang, dan Singapura yang akan berpartisipasi dalam *Garuda Shield* tahun ini. Sementara beberapa negara lain seperti Kanada, Prancis, India, Malaysia, Korea Selatan, Papua Nugini, Timor Leste, dan Inggris diperkirakan hadir sebagai pengamat. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas gabungan, yang merupakan bagian dari upaya memperkuat Kemitraan AS-Indonesia, serta mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka .

Cobra Gold

Cobra Gold mengacu pada latihan militer multi-nasional Indo-Pasifik yang diadakan di Thailand. *Cobra Gold* pertama

kali diadakan pada tahun 1982 dan telah meningkatkan koordinasi antara angkatan bersenjata Amerika Serikat dan Thailand dalam upaya militer dan bantuan kemanusiaan.

Mulai tahun 2021, *Cobra Gold* memiliki beberapa aktivitas berbeda yang menyoroti keamanan regional dan respons krisis regional yang efektif. Yang pertama adalah *Combined Arms Live-Fire Exercise* (CALFEX), yaitu peluru tajam ditujukan pada target yang telah ditentukan saat pasukan maju dan mendekati target mereka. Latihan Pos Komando (CPX) adalah ketika perwira militer terlibat dalam permainan perang terkomputerisasi, bantuan bencana, atau misi kemanusiaan selama beberapa hari. Latihan Amfibi (AMPHIBEX) yang menggabungkan kemampuan pergerakan kapal-ke-pantai, dengan pengepungan vertikal antara Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand dan militer AS, dengan pasukan sekutu yang bergantung pada perkembangan operasional.

Cobra Gold ke-41 yang dijadwalkan pada 20 Februari hingga 5 Maret akan menjadi versi "*Light Year*", dengan latihan yang diperkecil karena pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. Tahun ini sekitar 3.460 tentara dari 20 negara akan

berpartisipasi, termasuk 1.953 tentara dari Thailand, 1.296 dari AS, 50 dari Singapura, 41 dari Korea Selatan, 36 dari Malaysia, 35 dari Jepang, dan 16 dari Indonesia. Bergabung dengan mereka dalam latihan bantuan kemanusiaan adalah 18 tentara dari Australia, 10 dari Tiongkok, dan lima dari India. Tiongkok pertama kali mengikuti latihan *Cobra Gold* pada tahun 2015, meskipun pasukan militer Tiongkok hanya diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelatihan bantuan kemanusiaan.

SIMPULAN

Strategi pertahanan yang diadopsi AS dalam merespons ancaman yang dihadirkan oleh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik selama era pemerintahan Joe Biden menggambarkan perubahan paradigma yang signifikan. Pergeseran dari pendekatan yang lebih fokus pada dimensi militer menuju pendekatan yang holistik dan terintegrasi, dengan melibatkan diplomasi aktif, kerjasama militer, dan intervensi ekonomi yang lebih kuat, telah menjadi ciri khas dari respons AS.

Strategi ini mengakui kompleksitas ancaman yang muncul dari Tiongkok, termasuk aspek militer, ekonomi, dan pengaruh politik. Di bawah kepemimpinan

Joe Biden, AS telah memanfaatkan diplomasi aktif untuk membangun aliansi dan kemitraan dengan negara-negara di kawasan guna menghadapi pengaruh dan tindakan agresif Tiongkok. Kerja sama militer dengan negara-negara sekutu dan mitra regional juga menjadi prioritas, dengan tujuan memperkuat kekuatan pertahanan kolektif dan memberikan pesan kuat terhadap Tiongkok.

Dampak dari strategi pertahanan ini sangat berpengaruh terhadap dinamika keamanan regional di Indo-Pasifik. AS memiliki peran yang semakin tegas dalam menjaga stabilitas dan menghadapi ancaman, tetapi juga memberikan sinyal bahwa kolaborasi dan diplomasi tetap diutamakan. Oleh karena itu, era Joe Biden melahirkan perubahan signifikan dalam cara AS merumuskan dan menjalankan strategi pertahanannya di kawasan Indo-Pasifik, dengan tujuan menghasilkan lingkungan keamanan yang lebih aman dan stabil di tengah tantangan yang semakin rumit dan beragam.

REFERENSI

- Al Syahrin, M. N. (2018). China versus Amerika Serikat: Interpretasi rivalitas keamanan negara adidaya di kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Global dan Strategis*, 12(1), 145-160.
- CNN Indonesia. (2021, 01 29). *Biden Tunjukkan Sikap di Laut China Selatan, Cina Naik Pitam*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210129102048-113-599866/biden-tunjukkan-sikap-di-laut-China-selatan-Cina-naik-pitam>.
- Cordesman, A. H., & Burke, A. A. (2019). *China and the US: Cooperation, Competition and/or Conflict*. CSIS Report 1.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Department of Defense. (2022). *Pacific Deterrence Initiative*. Retrieved from https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2022/fy2022_Pacific_Deterrence_Initiative.pdf
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-perspektif Klasik Jawa Timur*. Jawa Timur: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Envall, D. (2019). *The Quadrilateral Security Dialogue: Towards an Indo-Pacific Order?*
- Freeman, C. P., & Oba, M. (2019). Bridging the Belt and Road divide. *Carnegie Alliance Policy Coordination Brief*.
- Garamone, J. (2021). *Concept of Integrated Deterrence Will Be Key to National Defense Strategy, DOD Official Says*. Retrieved April 18, 2022, from <https://www.defense.gov/News/News->

- Stories/Article/Article/2954945/integrated-deterrence-at-center-of-upcoming-national-defense-strategy/#:~:text=At%20the%20core%20of%20the,U.S.%20allies%20and%20our%20partners.
- Goh, E. (2006). Understanding 'Hedging' in Asia-Pacific security. *PacNet*, 43.
- Grabowski, M. (2021). Joe Biden's strategy in the Asia-Pacific region: change or continuity: a comparative analysis. *Polish Political Science Yearbook*, 50(4), 7-8.
- Grossman, M. (2005). The Tsunami Core Group: a step toward a transformed diplomacy in Asia and beyond. *Security Challenges*, 1(1), 11-14.
- (2022). *Hasil Wawancara*.
- Islami, F. (2013). Kebijakan Luar Negeri Taiwan di Bawah Presiden Ma Ying-Jeou (2008-2012) di Bidang Keamanan. *Ekonomi, dan Identitas dalam Hubungan antara Sela Taiwan dan China, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia*.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dari Pendekatan Edisi Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joyner, C. (1999). The Spratly Islands dispute in the South China Sea: problems, policies, and prospects for diplomatic accommodation. *Investigating confidence-building measures in the Asia-Pacific region*, 28, 53-108.
- Kuik, C.-C. (2021). Getting hedging right: a small-state perspective. *China International Strategy Review*, 3(3). doi:10.1007/s42533-021-00089-5
- Little, R., & Smith, M. (2005). *Perspectives on world politics*. Routledge.
- Lykke Jr, A. F. (1998). *Military Strategy: Theory and Application*. Carlisle, PA: U.S. Army War College,.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Company.
- Medcalf, R. (2019). Indo-Pacific Visions. *Asia Policy*, 14(3), 79-96.
- Norton, S. (2015). China's grand strategy. *China studies centre, The University of Sydney, Sydney, Australia*.
- Pape, R. A. (2005). Soft Balancing against the United States. *International Security, Vol. 30, No. 1 (Summer 2005)*, pp. 7-45, 30, (1), 7-45.
- Planifolia, V. (2017). Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 16-26.
- Rajagopalan, R. P. (2020). *Towards a quad-plus arrangement*.
- Scott, D. (2018). The Indo-Pacific in US Strategy: Responding to Power Shifts. *Rising Powers Quarterly*, 2(2), 19-43.

- Tagarev, T. (2006). The art of shaping defense policy: Scope, components, relationships (but no algorithms). *Connections: The Quarterly Journal*, 5(1).
- Tian, H., Suwarno, P., & Supriyadi. (2021). Konsep Lebensraum: Perebutan Hegemoni Laut China Selatan Antara China Dengan Amerika Serikat. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 127-136.
- US Department of Defense. (2022). Pacific Deterrence Initiative. *Department of Defense Budget Fiscal Year (FY)*. Retrieved April 18, 2022, from https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2022/fy2022_Pacific_Deterrence_Initiative.pdf
- Walt, S. M. (1987). *The Origin of Alliances*. New York:: Cornell University Press.
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. New York: McGraw-Hill.
- White House Government. (2022). *Statement by Australia, Japan, New Zealand, the United Kingdom, and the United States on the Establishment of the Partners in the Blue Pacific (PBP)*. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/24/statement-by-australia-japan-new-zealand-the-united-kingdom-and-the-united-states-on-the-establishment-of-the-partners-in-the-blue-pacific-pbp/>
- White House Washington. (2022). *Indo-Pacific Strategy*. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>
- Wong, A. M. (2015). Shifting policy postures of Indonesia and Thailand: responding to the China challenge. *Diss. Monterey, California: Naval Postgraduate School*.
- Yarger, H. R. (2008). Towards a theory of strategy: Art Lykke and the army war college strategy model. *US Army War College Guide to National Security Policy and Strategy*, 44-47.